

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, akan tetapi bukan dari negara Yunani modern melainkan dari bahasa Yunani kuno yang pada masanya masyarakatnya masih tradisional dan primitif. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni *demos* (rakyat), kata *demos* merujuk pada seluruh rakyat Athena yang merupakan bagian dari Yunani. Akan tetapi terkadang *demos* ini diartikan hanya rakyat biasa, atau bahkan orang miskin. Kata demokrasi ini dahulu sering digunakan oleh kalangan aristokrasi sebagai julukan terhadap rakyat biasa sebagai bentuk memperlihatkan rasa muak pada mereka, yang telah merampas kaum aristokrat yang sebelumnya sudah menguasai dalam pemerintahan.

Saat ini makna tersebut sudah bergeser, bahwa demokrasi tidak lagi sebagai celaan atau ejekan bagi rakyat biasa. Demokrasi berarti suatu bentuk pemerintahan yang didalamnya kekuasaan diselenggarakan oleh rakyat melalui keterlibatannya secara langsung dalam pemilu, yang kemudian dilaksanakan oleh perwakilannya dalam pengambilan keputusan serta dalam proses penentuan kebijakan.

Secara terminologi Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau kekuatan. Jadi arti dari demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Kekuatan tersebut mencakup sosial, budaya, dan ekonomi. Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat dan juga untuk rakyat, berbagai wakil rakyat yang telah dipilih sebagai pelaksana kekuasaan

negara, yang artinya rakyat sudah berkeyakinan bahwa seluruh kepentingan dan keinginan rakyat diperhatikan. (Abbas & Dompok, 2020)

Demokrasi identik dengan kedaulatan rakyat, yang mana rakyat adalah sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga tercapainya tujuan dari demokrasi yaitu memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people for the people*).

Menurut Duverger dan Dahl bahwa tidak ada pemerintahan demokrasi yang dikuasai oleh rakyat banyak, hanya sebagian orang saja yang mengatur dan menguasai pemerintahan. Karena pada zaman dahulu rakyatnya terbatas, berbanding terbalik dengan situasi saat ini maka tidak mungkin demokrasi dapat diterapkan. Akan tetapi demokrasi lebih kepada hakikatnya yang menunjukkan kepada cara atau sistem, serta yang mana sistem ini dapat dilangsungkan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.

Jadi kedaulatan tetap milik rakyat, yang didelegasikan kepada wakil rakyat (anggota parlemen), pendelegasian ini dilakukan melalui pemilu, dan penerima delegasi ini tidak boleh menggunakan kekuasaan politiknya untuk kepentingan pribadi, karena sifat dari kekuasaanya ialah milik bersama. Milik bersama disini memiliki makna harus dikelola secara bersama-sama, karena pada prinsipnya demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, artinya adalah masyarakat terlibat dalam proses pembuatan keputusan.

Dalam demokrasi rakyat atau warga negara, termasuk juga warga miskin dan tidak berpendidikan, menentukan siapa yang berkuasa melalui pemilu. Mereka menjadi penentu yang sebenarnya. Maka dari itu suara rakyat sangat penting bukan hanya menentukan siapa yang berkuasa, akan tetapi proses pemilihan atau pemilu berlangsung demokratis atau tidak, jujur dan adil atau tidak. Perilaku memilih memiliki makna demokratis, apabila mayoritas rakyat menilai bahwa demokrasi adalah suatu rezim yang baik.

Salah satu tolak ukur keberhasilan negara dalam menjalankan sistem demokrasi yaitu dengan pemilu, karena kedaulatan negara demokrasi berada di tangan rakyat. Kedaulatan diwakili oleh wakil rakyat di lembaga legislatif maupun eksekutif, setiap warga negara diberi kebebasan untuk memilih perwakilannya sesuai yang diinginkan.

Berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pemilihan Umum “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “.

2.1.1. Demokrasi di Indonesia

Indonesia mengadopsi demokrasi sebagai sistem politiknya sejak kemerdekaan. Demokrasi Indonesia telah mengalami berbagai perubahan,

mencerminkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi di setiap era. Berikut perkembangan demokrasi di Indonesia secara singkat:

1) Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer. Pada periode ini, kekuasaan pemerintahan berada di tangan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Pemilu pertama dilaksanakan pada 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante. Namun, sistem ini mengalami instabilitas karena seringnya pergantian kabinet, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri demokrasi parlementer dan memberlakukan kembali UUD 1945.

2) Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Dalam era Demokrasi Terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, peran parlemen dibatasi dan kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Soekarno mengedepankan prinsip "Nasakom", yaitu perpaduan antara nasionalisme, agama, dan komunisme. Pada masa ini, pemerintah berusaha menyatukan berbagai kekuatan politik, tetapi menimbulkan ketegangan antara kelompok-kelompok ideologis. Periode ini berakhir dengan konflik politik yang diikuti oleh Gerakan 30 September 1965 (G30S) dan munculnya Orde Baru.

3) Demokrasi Pancasila di Era Orde Baru (1966-1998)

Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia memasuki era Orde Baru yang menerapkan Demokrasi Pancasila. Secara teori, Demokrasi Pancasila

berlandaskan nilai-nilai Pancasila, tetapi dalam praktiknya, kekuasaan terpusat pada presiden, sementara oposisi politik dan kebebasan berekspresi dibatasi. Golkar sebagai partai pemerintah selalu memenangkan pemilu selama periode ini, sementara kontrol ketat terhadap pers dan lembaga politik melemahkan demokrasi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi ciri khas pemerintahan Orde Baru, yang akhirnya runtuh akibat krisis ekonomi dan tuntutan reformasi pada 1998.

4) Demokrasi Reformasi (1998-sekarang)

Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi, dengan berbagai pembaruan politik yang mengarah pada demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Reformasi meliputi pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan presiden langsung, kebebasan pers, dan peran yang lebih kuat untuk parlemen serta lembaga independen. Pada Pemilu 2004, rakyat Indonesia pertama kali memilih presiden secara langsung. Pemilu ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan demokrasi di Indonesia. Selain itu, ada upaya desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah, yang memberikan pemerintah daerah lebih banyak kewenangan.

2.1.2. Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak awal berdirinya negara ini. Berikut ringkasan perjalanan Pemilu di Indonesia:

1) Pemilu 1955

Pemilu pertama Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955, bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Konstituante. Pemilu ini dianggap sebagai yang paling demokratis, diikuti oleh banyak partai politik dan berfokus pada pembentukan dasar negara yang stabil. Namun, Konstituante gagal menghasilkan konstitusi baru, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.

2) Pemilu Orde Baru (1971-1997)

Di bawah pemerintahan Soeharto, Pemilu diadakan secara rutin setiap lima tahun sejak 1971. Namun, selama periode Orde Baru, Pemilu dianggap tidak sepenuhnya demokratis karena dominasi partai pemerintah (Golkar) dan pengaturan yang menguntungkan penguasa. Hanya ada tiga partai politik yang diizinkan, yaitu Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada setiap pemilu, Golkar selalu menang secara mutlak.

3) Pemilu Reformasi (1999)

Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Pemilu 1999 menjadi Pemilu pertama di era Reformasi. Pemilu ini diikuti oleh banyak partai politik baru dan merupakan pemilu paling terbuka sejak 1955. Pemilu 1999 menghasilkan pemerintahan baru dengan Abdurrahman Wahid sebagai presiden yang dipilih oleh MPR.

2.1.3. Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, diantaranya dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini meliputi tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*), atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya. (Budiarjo, 2019)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah tindakan atau kegiatan untuk mendukung ataupun mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Dalam kaitannya dengan pemilihan umum, tindakan atau kegiatan yang dapat diambil dapat berupa ikut serta dalam pemilihan umum ataupun tidak. Banyak hal yang mempengaruhi keputusan politik tersebut, antara lain akibat adanya perbedaan perilaku dalam pemilihan umum. Setidaknya ada tiga aliran pemikiran yang berbeda dalam memahami perilaku pemilih dalam pemilihan umum, diantaranya pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan rasional.

2.2. Perilaku Pemilih

Menurut (Mahendra, 2005) Perilaku Pemilih adalah tindakan seseorang ketika ikut serta dalam memilih orang, partai politik atau isu-isu publik tertentu. Maka dapat dipahami bahwa perilaku pemilih merupakan suatu kegiatan pemilih terkait pemilihan langsung. Sedangkan menurut (Kristiadi, 1996) perilaku pemilih

adalah keterikatan seseorang untuk memberikan suara pada proses pemilihan umum berdasarkan dengan faktor psikologis, faktor sosiologis, dan faktor rasional pemilih (*factor behavioral theory*).

Menurut (Surbakti, 1999) berpandangan bahwa perilaku pemilih adalah bagian dari perilaku politik yang menggambarkan keikutsertaan warga negara ketika terjadi proses pemilihan umum yang juga menjadi serangkaian kegiatan memilih keputusan antara ya dan tidak, dan apabila memilih akan memilih kandidat X atau kandidat Y?. Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan diatas terdapat kesimpulan bahwa perilaku pemilih yaitu berupa tindakan seseorang untuk memberikan hak pilihnya pada pemilihan umum, yang menjadi perhatian adalah mengapa seseorang memilih partai tertentu bukan partai yang lain, kandidat tertentu bukan yang lain.

Dalam konteks politik *voting behavior* (perilaku pemilih) berarti suatu tindakan menentukan pilihan atau memilih partai politik atau calon wakil rakyat yang akan menduduki kursi anggota legislatif atau menentukan seorang pemimpin di dalam sistem pemerintahan baik di tingkat daerah maupun di tingkat yang lebih tinggi yaitu nasional. Di dalam kehidupan berpolitik, perilaku pemilih tidak dapat dipisahkan dalam demokrasi. Pada konteks demokrasi perilaku pemilih terwujud ketika adanya suatu pemilihan umum, kegiatannya adalah ketika seseorang menentukan pilihan terhadap suatu calon anggota legislatif, calon kepala daerah , calon presiden maupun partai politik.

Dalam pemahaman perilaku pemilih, terdapat dua aliran utama, yaitu mazhab Colombia dan mazhab Michigan. Dalam mazhab pertama, penekanannya

terletak pada aspek sosiologis sebagai faktor yang signifikan dalam memengaruhi perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Pendekatan ini meyakini bahwa masyarakat memiliki struktur norma dasar sosial yang tergantung pada pengelompokan sosiologis seperti jenis kelamin, usia, kelas sosial, dan agama, yang dianggap berperan besar dalam membentuk perilaku pemilih masyarakat (Gaffar, Affan, 1999:43).

Mazhab Michigan lebih menitikberatkan pada aspek psikologis sebagai faktor yang memiliki dampak terhadap perilaku pemilih. Pola perilaku politik individu dipengaruhi oleh faktor internal seperti tingkat kecerdasan, faktor biologis, dan aspek emosional. Sikap ini muncul sebagai hasil dari proses sosialisasi politik oleh suatu partai, yang kemudian menciptakan simpati terhadap partai politik tersebut. Perilaku pemilih didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang terjadi saat mengambil keputusan, termasuk tindakan memilih atau tidak memilih.

2.1.1. Pendekatan Perilaku Pemilih

1) Pendekatan Psikologis

Perilaku pemilih sangat bergantung berdasarkan politik lingkungan disekitarnya. Identifikasi tentang kepartaian yang merupakan suatu wujud dari sosialisasi politik bisa dibina oleh orang tua, organisasi kemasyarakatan, dll. Sosialisasi ini berkenaan dengan nilai-nilai dan norma yang diturunkan oleh orang tua, organisasi kemasyarakatan, dll. Maka tidak aneh ketika seorang anak memiliki kesamaan pilihan politik dengan orang tuanya. Maka bisa disimpulkan bahwa pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang melihat perilaku pemilih bentukan dari proses sosialisasi

yang melahirkan ikatan emosional yang mengarahkan perilaku pemilih seseorang kepada suatu pilihan politik.

2) Pendekatan Sosiologis

Menurut Agustino dan Yusoff (2009) Pendekatan Sosiologis betapa pentingnya beberapa hal yang berkaitan dengan instrumen kemasyarakatan sosial ekonomi (seperti pendapatan, kelas, pendidikan, dan jenis pekerjaan) etnik, agama atau bahkan tempat tinggal (seperti kota, kabupaten, desa, pesisir, atau bahkan pedalaman). Bahkan hanya menyebut nama saja memiliki kaitan erat dengan suatu pilihan atau perilaku pilihan.

3) Pendekatan Rasional

Menurut (Syafhendry, 2016) “Rasionalitas merupakan suatu sikap dan tindakan yang mempertimbangkan segala sesuatu secara rasional dan logis. Dalam konteks perilaku politik, maka rasionalitas politik termasuk pula rasionalitas perilaku pemilih. Berdasarkan rasionalitas itu, individu melakukan sesuatu tindakan politik berdasarkan faedah yang boleh ia dapat daripada apa-apa yang ia lakukan tersebut”. Sebaliknya pemilih dirasa tidak rasional ketika memilih pemimpin hanya berdasarkan agama, daerah, sifat, dll. Maka dapat disimpulkan bahwa pemilih yang benar-benar rasional akan menilai secara valid seseorang atau partai yang akan dipilihnya baik berupa visi, misi, maupun program kerja dari partai atau kandidat yang akan dipilihnya. Pemilih rasional memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan, maupun informasi yang cukup. Apa yang mereka lakukan bukan sekedar faktor kebetulan atau kebiasaan, dan tidak hanya untuk kepentingan sendiri

melainkan untuk kepentingan bersama/umum dengan pemikiran dan pertimbangan yang logis/matang.

Sedangkan menurut (Surbakti, 1999) bahwa ada beberapa pendekatan dalam memahami alasan pemilih memilih para kontestan politik tertentu, diantaranya:

a) Pendekatan Struktural

Pendekatan yaitu melihat kegiatan memilih sebagai produk dari sesuatu yang lebih luas, seperti kelas sosial, agama, bahasa, dan nasionalisme dan juga berdasarkan, sistem pemilihan umum, permasalahan, sistem partai, dan juga program yang ditawarkan oleh partai.

b) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini yaitu pendekatan yang mengaitkan kegiatan memilih dengan konteks sosial, dimana pilihan seseorang dalam pemilihan umum berdasarkan latar belakang, demografi dan juga sosial ekonomi berdasarkan jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan juga agama.

c) Pendekatan Ekologis

Pendekatan ini hanya relevan apabila suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan-perbedaan karakteristik pemilih di dalam memilih berdasarkan teritorial.

d) Pendekatan Psikologi Sosial

Berupa identifikasi partai apabila partai yang dirasa secara emosional terasa sangat dekat dan dipilih tanpa faktor dipengaruhi orang lain.

e) Pendekatan Pilihan Rasional

Yaitu melihat kegiatan memilih dengan memperhitungkan untung dan rugi.

2.2. Elektabilitas

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa, maupun orang, badan, atau partai. Elektabilitas selalu dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik, begitupun elektabilitas kandidat berarti tingkat keterpilihan kandidat di publik. Apabila elektabilitas partai politik atau kandidat tinggi berarti partai dan tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka suatu objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan.

Seseorang kandidat atau suatu partai yang memiliki elektabilitas tinggi adalah kandidat atau partai yang dikenal luas oleh masyarakat. Elektabilitas dapat meningkat dengan pencitraan politik. Citra politik berkaitan dengan pembentukan pendapat umum karena pada dasarnya pendapat umum terbangun melalui citra politik, karena sejatinya citra politik akan mempengaruhi sukses atau tidaknya berjalanya suatu kampanye.

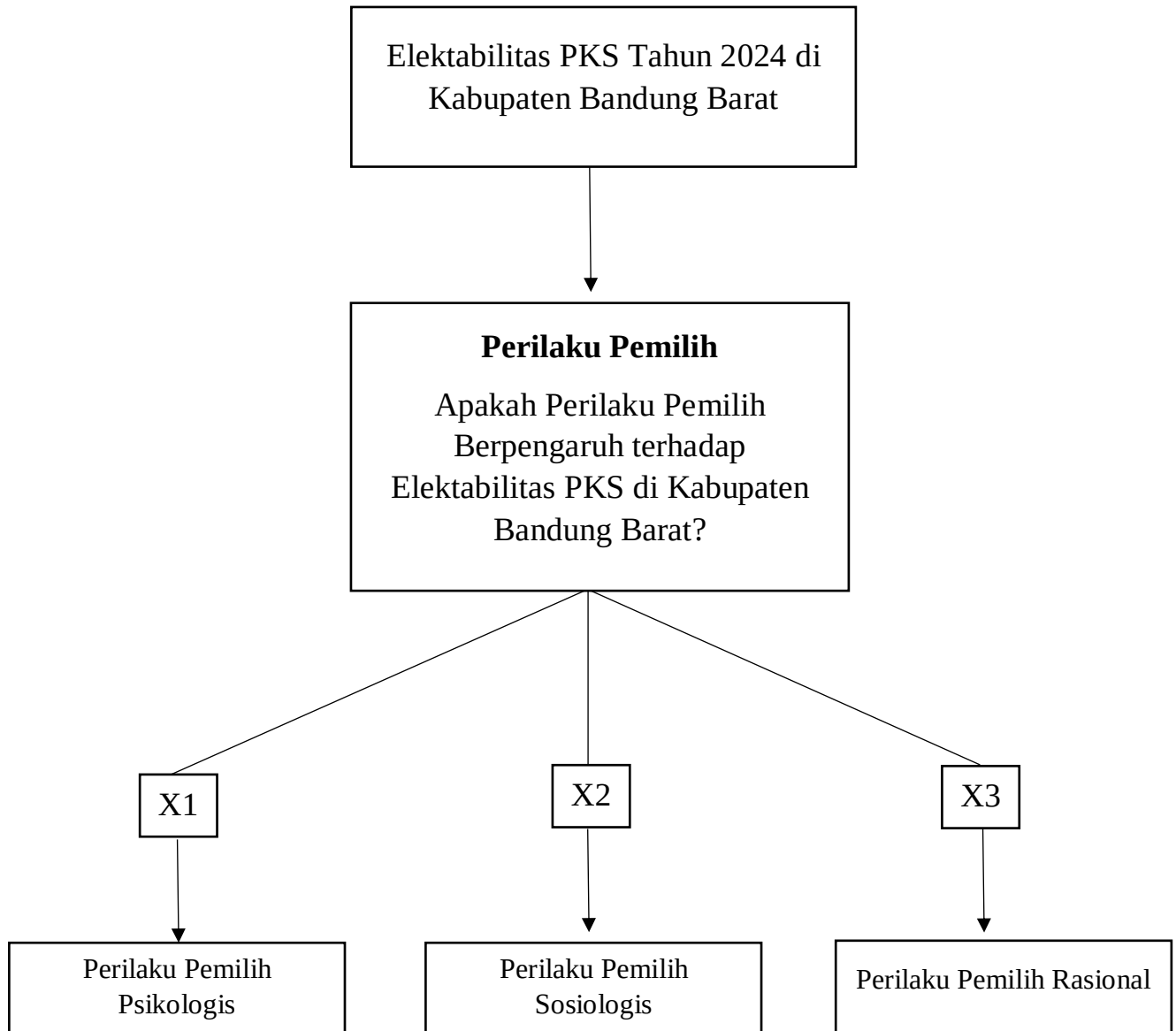
Dalam dunia politik Elektabilitas bisa tercipta apabila kandidat atau partai sudah memiliki popularitas sebelumnya. Popularitas adalah suatu tingkat kepopuleran seseorang di kalangan masyarakat. Meskipun begitu, walaupun seorang kandidat atau partai memiliki popularitas tidak menjamin layak dipilih dan juga masyarakatpun belum tentu memilih kandidat tersebut hanya karena populer saja. Hal yang menentukan tingginya elektabilitas adalah teknik

kampanye yang dilakukan. Adapun beberapa poin mengenai arena atau dimensi dalam suatu elektabilitas diantaranya:

1. Suka terhadap suatu calon atau partai
2. Ketertarikan terhadap calon atau partai
3. Menjadi simpatisan calon atau partai
4. Membuat informasi politik dan menyebarkan mengenai calon atau partai
5. Memilih calon atau partai yang terbaik.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kecenderungan perilaku pemilih (*voting behavior*) dengan tiga pendekatan yaitu: pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan rasional mengenai penelitian dengan judul pengaruh perilaku pemilih terhadap elektabilitas PKS tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat, dijelaskan pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Setelah diuraikan dengan landasan teori perilaku pemilih adalah suatu tindakan individu yang penting ketika memberikan suara pada pemilihan langsung, yang mana hal ini menyangkut keputusan seseorang ketika menjatuhkan pilihan kepada kandidat atau partai tertentu yang dianggap tepat untuk menduduki jabatan politis tertentu. Proses pemilu ini merupakan salah satu wujud dari demokrasi,

begitupun keikutsertaan dalam pemilu atau memberikan suara merupakan hal yang paling penting guna menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin atau wakil rakyat kedepannya.

Calon anggota legislatif yang terpilih diharapkan mampu mengemban amanah yang telah diberikan dengan baik dan mampu menherap aspirasi masyarakat jika terpilih dan sesuai dengan Undang-Undang bahwa partai politik atau calon tersebut secara sah untuk mewakili masyarakat yang memilihnya. Wakil-wakil inilah yang nantinya akan menentukan kebijakan dari berbagai aspek yang nantinya kebijakan itu akan kembali kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajiban yang telah dibuat.

Dalam menentukan pilihannya masyarakat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan diantaranya ikatan emosional (perilaku psikologis), karakteristik sosial seperti Agama, suku, dan tempat tinggal (perilaku sosiologis), dan ideologi, visi misi atau program kerja serta pertimbangan untung rugi (perilaku rasional).

2.4. Hipotesis

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, maka dirancang sebuah hipotesis yang nantinya akan diuji dalam penelitian ini yaitu :

- H1a : variabel perilaku psikologis berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat
- H01 : variabel perilaku psikologis tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat

- H1b : variabel perilaku sosiologis berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat
- H0b : variabel perilaku sosiologis tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat
- H1c : variabel perilaku rasional berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat
- H0c : variabel perilaku rasional tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat